

PENDAMPINGAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE) DALAM KEGIATAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) KABUPATEN SITUBONDO

ASSISTANCE OF ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE) IN GENDER MAINSTREAMING (PUG) INSTITUTIONALIZATION ACTIVITIES IN SITUBONDO REGENCY

Vita Novianti

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email: vitanovianti@unars.ac.id

Abstraksi :

Pembangunan yang berkeadilan disegala bidang merupakan salah satu bentuk untuk memberikan akses partisipasi yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Keberpihakan pemerintah kepada perempuan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang diaplikasikan pada semua jenis program kerja pemerintah. Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang merumuskan kesetaraan gender dalam misi Bupati Situbondo “Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas dan Meningkatkan Peran Perempuan”. Misi yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 sekaligus menjadi landasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo dan dinas teknis terkait lain dalam menjalankan program kerjanya. Dengan menyuarakan kesetaraan gender dalam hal ini berarti memberikan perhatian lebih terkait isu dan permasalahan gender yang terjadi di Kabupaten Situbondo. Kegiatan ini dilakukan untuk membangun sinergitas pemahaman terhadap semua lembaga pemerintah di Kabupaten Situbondo dalam rangka mewujudkan pembangunan yang responsive gender sekaligus untuk mempersiapkan evaluasi pengarusutamaan gender pada tahun 2023. Output dari kegiatan ini adalah Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam bentuk program/kegiatan terhadap kesenjangan yang masih terjadi di masing-masing lembaga pemerintah di Kabupaten Situbondo.

Abstract :

Equitable development in all fields is a form of providing access to equal participation for women and men. The government's alignment with women through Presidential Instruction Number 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming (PUG) in National Development aims to achieve gender justice and equality applied to all types of government work programs. Situbondo Regency is one of the regencies that formulated gender equality in the mission of the Regent of Situbondo "Building Healthy, Smart Situbondo Communities and Increasing the Role of Women". The mission contained in the 2021-2026 RPJMD is also the foundation of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB) of Situbondo Regency and other related technical offices in carrying out their work programs. Voicing gender equality in this case, it means giving more attention to gender issues and problems that occur in Situbondo Regency. This activity is carried out to build a synergy of understanding between all government institutions in Situbondo Regency in order to realize gender-responsive development as well as to prepare for an evaluation of gender mainstreaming in 2023. The output of this activity is a Follow-up Plan (RTL) in the form of programs/activities to address gaps that is still happening in each government institution in Situbondo Regency.

Keywords: *Gender Mainstreaming, Assistance, Government Institutions*

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia pada hakikatnya merupakan strategi pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pembangunan yang berkeadilan disegala bidang merupakan salah satu bentuk untuk memberikan akses partisipasi yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada perempuan yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang diaplikasikan pada semua jenis program kerja pemerintah untuk merespon kebutuhan masyarakat. PUG merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Selain itu, PUG juga ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan (RPJMN 2015-2019). Sedangkan dalam pelaksanaannya, PUG mensyaratkan dipenuhinya tujuh prasyarat, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data, alat analisis, dan partisipasi masyarakat.

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang merumuskan kesetaraan gender dalam misinya. Hal ini tercantum dalam misi kedua Bupati Situbondo yang berbunyi “Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas dan Meningkatkan Peran Perempuan”. Misi yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 sekaligus menjadi landasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo dalam menjalankan program kerjanya. Menyuarakan kesetaraan gender dalam hal ini berarti memberikan perhatian lebih terkait isu dan permasalahan gender yang terjadi di Kabupaten Situbondo. Seperti kasus kekerasan berbasis gender yang masih banyak terjadi, mulai dari pernikahan anak di bawah umur, kekerasan seksual, kesenjangan sosial di bidang pendidikan dan ekonomi hingga kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu komitmen Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui perencanaan dan alokasi anggaran publik yang berbasis pengarusutamaan gender di masing-masing lembaga dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program skala prioritas pemerintah.

Keberhasilan dan permasalahan PUG di Kabupaten Situbondo dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis berdasarkan tugas dan fungsi lembaga pemerintah yang ada. Sehingga kebijakan atau program yang dibuat menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui perkembangan lembaga pemerintah melakukan integrasi PUG ke dalam perencanaan dan kegiatan. Sekaligus

mengetahui komponen yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

Kegiatan dilaksanakan di Aula Lantai II Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 pukul 08.00 – 12.00 WIB. Tujuan dari kegiatan ini untuk mempersiapkan Evaluasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Situbondo. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri dari 44 Perangkat Daerah (Sekretariat, Dinas, dan Badan), 10 Lembaga Masyarakat, 1 Perguruan Tinggi, 3 Dunia Usaha, dan 2 Media Massa di Kabupaten Situbondo. Sehingga total peserta yang hadir berjumlah 108 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis Pengarusutamaan Gender (PUG) yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2021-2026 ditinjau dari berbagai aspek, terdapat beberapa indikator pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan. Namun demikian masih terdapat pula berbagai permasalahan sekaligus menjadi isu strategis daerah di Kabupaten Situbondo, yaitu; jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan masih kurang sebanyak 15 kebijakan dari target nasional, (2) keterwakilan perempuan pada parlemen tingkat daerah (DPRD) menurun, (3) proporsi perempuan yang berada di posisi managerial mengalami penurunan sebesar 0,01% dari tahun 2016, (4) angka perkawinan anak mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 57,21% (2,29% di tahun 2019 dan 3,60% di tahun 2020) dan (5) belum maksimalnya keterlibatan forum anak dan disabilitas dalam proses pengambilan kebijakan di pemerintah daerah. Implementasi Pengarusutamaan Gender PUG di

METODE

Kabupaten Situbondo dengan beberapa seperangkat komponen yang disebut tujuh prasyarat, dengan perkembangan sebagai berikut.

1. Komitmen

Komitmen yang dimaksud adalah komitmen politik dan kepemimpinan lembaga yang dituangkan dalam bentuk rencana strategis perangkat daerah atau lembaga pemerintah. Sebagian besar rencana strategis/rencana kerja lembaga pemerintah di Kabupaten Situbondo sudah responsif gender dengan perkembangan dan pelaksanaan yang bervariasi

2. Kebijakan

Kebijakan dituangkan dalam bentuk Peraturan, Strategi, Program, Panduan, Juklak/Juknis, dan lain sebagainya. Kebijakan yang responsif gender di Kabupaten Situbondo masih kurang sebanyak 15 kebijakan dari target nasional. Perangkat daerah teknis diminta segera menindaklanjuti untuk mengusulkan kebijakan yang dimaksud sebelum pelaksanaan penilaian APE di tahun 2023.

3. Kelembagaan

Struktur dan mekanisme kelembagaan yang mendukung implementasi PUG, dapat berbentuk Kelompok Kerja/Tim Pengarusutamaan Gender, Focal Point, sekretariat Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dan/atau lainnya. Komponen kelembagaan adalah satu prasyarat yang sudah terpenuhi di Kabupaten Situbondo. Dengan indikator seluruh kepala perangkat daerah menjadi anggota pokja PUG, semua perangkat daerah memiliki focal poin yang ketuanya adalah sekretaris dinas dengan pertemuan

rutin yang dilakukan setiap tahun.

4. Sumber daya

Sumber daya dalam implementasi pengarusutamaan gender merupakan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan keterampilan analisis gender, serta sumber daya mengimplementasikan pengarusutamaan gender. DP3AP2KB Kabupaten Situbondo melaksanakan pelatihan PPRG secara rutin untuk perangkat daerah sehingga di setiap perangkat daerah memiliki perencana yang sudah dilatih PPRG. Inspektorat juga memiliki auditor terlatih PPRG sehingga pada saat melaksanakan fungsi evaluasi dan monitoring, inspektorat memiliki pemahaman yang sama terkait dokumen perencanaan dan pelaksanaan PUG di lembaga pemerintah.

5. Data terpilah

Data terpilah merupakan data kuantitatif menurut jenis kelamin, status, kondisi laki-laki dan perempuan, wilayah, dan kategori lain yang mendukung di seluruh bidang pembangunan. Kabupaten Situbondo sudah melakukan data terpilah berbasis gender dan anak.

6. Alat analisis

Adanya alat analisis untuk perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi dalam implementasi pengarusutamaan gender. Gender Analysis Pathway (GAP) adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.

Dengan menggunakan GAP, para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan dapat mengidentifikasi kesenjangan gender (gender gap) dan permasalahan gender (gender issues) serta

sekaligus menyusurenan kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut.

7. Partisipasi Masyarakat

Adanya dorongan dan keterlibatan masyarakat dalam implementasi pengarusutamaan gender. Peran Serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk forum komunikasi dengan para pakar gender atau organisasi yang terkait dalam implementasi Pengarusutamaan Gender. Masyarakat yang menjadi stakeholder dalam implementasi PUG terdiri dari lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dan perguruan tinggi. Penekanan bagian ini adalah peran perguruan tinggi di Kabupaten Situbondo dalam mendukung untuk mewujudkan kabupaten yang responsive gender. UNARS adalah salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Situbondo yang ikut mendukung dan mewujudkan kabupaten yang responsive gender melalui penelitian, pengabdian dan mengintegrasikan dalam kurikulum. Edukasi yang terus menerus dilakukan kepada mahasiswa sebagai generasi muda yang memutus mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mahasiswa juga sebagai generasi muda harus meletakkan landasan yang kokoh bagi pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Pada akhirnya seluruh upaya baik ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan di masyarakat Kabupaten Situbondo terutama ke arah masyarakat yang lebih toleran, anti diskriminasi dan anti kekerasan.



Gambar 1 : Foto bersama Narasumber Lain



Gambar 2: Foto bersama peserta

KESIMPULAN

Kegiatan ini dilakukan untuk membangun sinergitas pemahaman terhadap semua lembaga pemerintah di Kabupaten Situbondo dalam rangka mewujudkan pembangunan yang responsive gender sekaligus untuk mempersiapkan evaluasi pengarusutamaan gender pada tahun 2023.

Partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu komponen utama dalam percepatan tujuan PUG melalui organisasi, LSM dan perguruan tinggi. Sehingga akan terwujud masyarakat yang sehat, cerdas dan terjadi peningkatan peran perempuan dalam mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Situbondo.

Sebagai saran dalam kegiatan ini, ditujukan kepada perguruan tinggi sebagai komponen masyarakat untuk melakukan upaya konkrit melalui edukasi kepada mahasiswa serta kegiatan yang terintegrasi dengan tujuan PUG. Edukasi terhadap masyarakat dapat dilakukan melalui penelitian dan pengabdian sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo yang telah memberi kesempatan untuk menjadi narasumber pada Pendampingan Anugerah Parahita Ekapraya Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengabdian dosen kepada masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026